

**UPAYA PERGERAKAN ORGANISASI PETANI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA**
(Studi Pada Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) Di Desa Bujuk
Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)

(Skripsi)

Oleh

David Bahar Diwantoro
NPM 1616011042



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

UPAYA PERGERAKAN ORGANISASI PETANI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

(Studi Pada Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) Di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)

Oleh

David Bahar Diwantoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dalam usaha reforma agraria dan bagaimana jaringan sosial, kekuatan internal hambatan-hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan ini adalah naratif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL merupakan suatu wadah atau yang bisa disebut organisasi yang menyatukan masyarakat korban yang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya kembali dikarenakan konflik lahan antara masyarakat desa Bujuk Agung dengan PT. BNIL. Upaya-upaya yang sudah dilakukan yaitu melalui jalur advokasi dengan menjalin relasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, KPA dan juga instansi pemerintah seperti Kementerian Desa, Komnas HAM, dan Kementerian ATR BPN.

Selain melalui jalur hukum STKGB juga melakukan kampanye publik seperti melakukan tuntutan dan aksi demo yang berujung pada kriminalisasi petani. STKGB sebagai organisasi petani sudah melakukan upaya penyelesaian bertahun-tahun hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang sudah dilakukan dan hasil perjuangannya permasalahan ini juga sudah ditangani oleh pemerintah pusat dan menjadi salah satu daftar kasus konflik agraria yang di prioritaskan untuk diselesaikan. Hambatan dalam perjuangan STKGB dari segi internal yaitu kurangnya solidaritas antar anggota dan kurangnya pemahaman pemuda sebagai penerus perjuangan terkait perkembangan konflik yang terjadi, kemudian dari eksternal yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro korporasi sehingga permasalahan ini belum menemui titik terang dalam proses penyelesaian.

Kata Kunci : *Organisasi Petani, Konflik Agraria, Gerakan Sosial Petani*

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE MOVEMENT OF FARMER ORGANIZATIONS IN SOLVING AGRARIAN CONFLICTS

(Study on farmer unions victims of the eviction of PT. BNIL in Bujuk Agung Village. Banjar Margo District, Tulang Bawang Regency)

By

David Bahar Diwantoro

This study aims to find out how the efforts made by the Evicted Farmers Union of PT. BNIL (STKGB) in agrarian reform efforts and how social networks, internal strengths, obstacles and actors involved in the process of resolving agrarian conflicts that occurred in Bujuk Agung Village, Banjar Margo District, Tulang Bawang Regency. The research method used is a narrative with a qualitative approach. Data obtained by in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the Evicted Farmers Union of PT. BNIL is a forum or what can be called an organization that unites victims who are struggling to get their land rights back due to land conflicts between the villagers of Bujuk Agung and PT. BNIL. Efforts that have been made, namely through advocacy channels by establishing relationships with Legal Aid Institutions, KPA and also government agencies such as the Ministry of Villages, Komnas HAM, and the Ministry of Agrarian and Human Rights BPN.

Apart from going through legal channels, STKGB also carried out public campaigns such as holding lawsuits and demonstrations which led to the criminalization of farmers. STKGB as a farmer's organization has made efforts to resolve this for years. This can be seen from the various efforts that have been made and the results of their struggle. This problem has also been handled by the central government and has become one of the lists of agrarian conflict cases that are prioritized for resolution. Obstacles in the struggle for STKGB from an internal perspective, namely the lack of solidarity between members and a lack of understanding of youth as successors to the struggle related to the development of the conflict that occurred, then from the external, namely pro-corporate government policies so that this problem has not yet found a bright spot in the resolution process.

Keywords: Farmers Organization, Agrarian Conflict, Peasant Social Movement

**UPAYA PERGERAKAN ORGANISASI PETANI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA
(Studi Pada Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) Di Desa
Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang,
Lampung)**

Oleh

DAVID BAHAR DIWANTORO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA PERGERAKAN ORGANISASI
PETANI DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK AGRARIA (Studi Pada Serikat
Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) Di
Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)**

Nama Mahasiswa : **David Bahar Diwantoro**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616011042**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1 **Komisi Pembimbing**

Drs. Ikram M.Si

NIP. 19610602 198902 1001

2 **Ketua Jurusan Sosiologi**

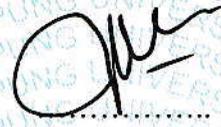
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

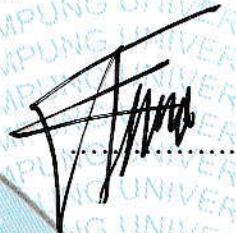
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ikram, M.Si**



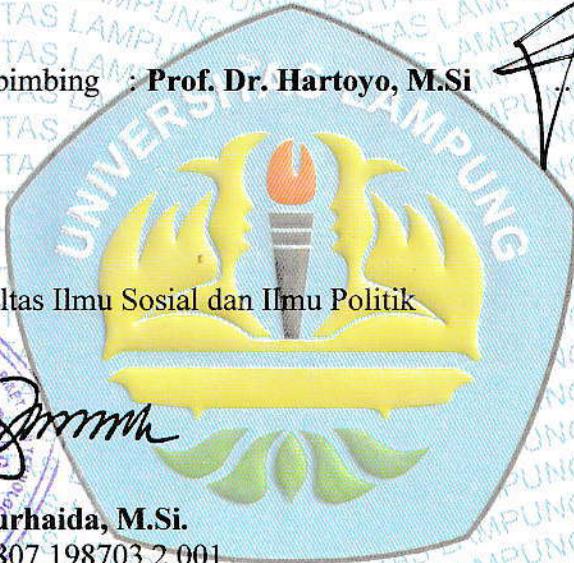
Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Hartoyo, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1.Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2.Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
- 3.Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4.Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandarlampung, 23 Juni 2023



David Bahar Diwanto
1616011042

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama David Bahar Diwantoro dilahirkan di Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 27 Mei 1998, sebagai anak kedua dari Tiga bersaudara, dari Bapak Alm. Nurhadi dan Ibu Siti Komariyah, S.Pd.

Penulis menempuh pendidikan di TK Islam Permata 02 Namun tidak sampai lulus, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Bujuk Agung dan lulus pada tahun 2010. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Banjar Margo dan lulus pada tahun 2013, dan dilanjutkan menempuh pendidikan di SMAN 1 Banjar Margo dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016, penulis diterima menjadi mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Selama perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi (HMJ Sosiologi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta aktif tergabung dalam organisasi tingkat Fakultas yaitu FSPI FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2020 Penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota Bandarlampung dan berfokus dalam Prgram Keluarga Harapan (PKH). Kemudian mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ojolali, kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Pada akhir perkuliahan atas dukungan, bimbingan, dan pertolongan Allah S.W.T.

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Upaya Pergerakan Organisasi Petani Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Pada Serikat Tani Korban Gusuran Pt. Bnil (Stkgb) Di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung) ” sebagai syarat akhir kelulusan penulis mencapai gelar sarjana.

MOTTO

“Sukses Adalah Saat Persiapan dan Kesempatan Bertemu”.

(Bobby Unser)

“Orang Yang Hebat Adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Menyembunyikan Kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih, rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Dengan penuh ucapan syukur, saya persembahkan karya saya ini kepada:

Almarhum Bapak tersayang Alm. Bpk. Nurhadi.

Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi semasa hidup mu, mendidik, membesarkan, dan mendidik sampai saya ada di tahap ini. Terimakasih sudah selalu mendukung apapun yang saya pilih. Terimakasih sudah memberikan kekuatan sehingga saya bisa menngkerjakan skripsi saya sampai selesai.

Ibu tersayang Siti Komariyah, S.Pd

Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan ibu. Tulisan ini saya dedikasikan untuk ibu, yang selalu ada disamping saya sampai tulisan ini selesai.

Terimakasih tak terhingga ibu.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga Penulis Skripsi dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Upaya Pergerakan Organisasi Petani Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Pada Serikat Tani Korban Gusuran Pt. Bnil (Stkgb) Di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai ujian dan tantangan, namun dapat berhasil melewati dan terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Terima kasih atas segala kuasa, keridhoan, bantuan, melalui nikmat kesehatan, kesabaran, kemudahan serta petunjuk yang selalu Engkau limpahkan. Kepada Nabi Muhammad SAW atas risalah, kebenaran firman yang Engkau bawa serta cahaya penerang yang Engkau sampaikan kepada kami umat-Mu.
2. Almarhum Bapak tersayang, terima kasih atas dukungan dan motivasi untuk

menyelesaikan skripsi ini, Alhamdulillah ahang bisa mewujudkan harapan dan impian bapak agar anaknya menjadi sarjana.

3. Ibu tersayang, terima kasih untuk selalu percaya dan mendukung ahang untuk mencapai keinginan ahang.
4. Mbak Uyung tersayang, terima kasih sudah melanjutkan tanggung jawab Almarhum Bapak membimbing dan mendukung kebutuhan adikmu.
5. Kepada sanak saudara Dewot, Habib, Sopi, Galang terima kasih selalu percaya dengan mamasmu.
6. Kepada yang terkasih, Devi Sekar Ayu terima kasih karena selalu setia menemani di dalam suka dan duka, selalu ada disetiap saat, selalu menjadi support system dan selalu menjadi penenang dan percaya dengan setiap jalan dan keputusan yang aku pilih. Alhamdulillah berkat doamu juga aku diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dr. Bertoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
9. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.
10. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, memberikan saya kritik dan saran, motivasi serta arahan. Semoga Allah selalu membalas kebaikan Bapak.
11. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si selaku dosen Pembahas. Terima kasih sudah bersedia memberikan kritik, saran, motivasi serta memberikan dukungan

kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak.

12. Terima kasih kepada seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung terutama kepada para dosen Jurusan Sosiologi dan Staf Jurusan Sosiologi atas segala kebaikan dan ilmu-ilmu bermanfaat yang telah diberikan selama proses perkuliahan berlangsung sampai akhirnya penulis menyelesaikan studi.
13. Sosiologi 2016, terutama Adit(Jarwo), Reza (Banteng), Ipul, Deny, Abit, Zikri, Ntis, Rudy, Afdal dan kepada anak-anak AMS (Yongky, Rendy, Fathur, Afar, Romi) terima kasih atas segala dukungan dan jasa yang telah kalian berikan, walaupun saya ditinggalkan sendirian terakhir semoga selalu sukses dengan kehidupan masing-masing.
14. Yofan, Yohanes, Fadilla, Raxy, Bang Ozi, Mas Febri, sudah menjadi support system termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Ojolali yang sudah menjadi teman hidup selama 40 Hari di Way Kanan.

Bandarlampung, Juni 2023
Penulis,

David Bahar Diwantoro

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Gerakan Sosial Petani	9
2.1.1 Pengertian Gerakan Sosial Petani	9
2.1.2 Tipologi Gerakan Sosial	10
2.2 Reforma Agraria	12
2.2.1 Pengertian Reforma Agraria	12
2.3 Konflik Sosial	13
2.3.1 Pengertian Konflik Sosial	13
2.3.2 Jenis-jenis Konflik Sosial	16
III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Metode Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian	20
3.3 Fokus Penelitian	21
3.4 Informan Penelitian	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Teknik Analisis Data	24
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
4.1 Kondisi Kampung Bujuk Agung	25
4.1.1 Sejarah Kampung	25
4.1.2 Demografi Kampung	30
4.1.3 Kondisi Pemerintahan Kampung	36

4.2 4.2	Gambaran Umum Komunitas Serikat Tani Korban Gusuran PT.BNIL (STKGB).....	38
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1	Profil Informan	41
5.2	Hasil Penelitian	45
5.2.1	Latar Belakang Terbentuknya Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB)	46
5.2.2	Upaya-upaya Reform Agraria yang dilakukan Komunitas	53
5.2.3	Respon Masyarakat Terhadap Perjuangan STKGB	60
5.3	Pembahasan	65
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
6.1	Kesimpulan	76
6.2	Saran	78
	DATAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Urutan Nama Kepala Kampung	29
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kampung Bujuk Agung	31
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Bujuk Agung	32
Tabel 4 Mata Pencaharian Warga Kampung Bujuk Agung	33
Tabel 5 Pola Penggunaan Tanah Kampung Bujuk Agung	34
Tabel 6 Data Kepemilikan Ternak Kampung Bujuk Agung	34
Tabel 7 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kampung Bujuk Agung	35
Tabel 8 Pembagian Wilayah pemerintahan Kampung Bujuk Agung	36
Tabel 9 Daftar Informan Penelitian	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kampung Bujuk Agung30

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelesaian konflik agraria menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia pada era Presiden Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dalam salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo yaitu Nawacita (Sembilan agenda utama) yang memuat agenda reforma agraria. Dalam pelaksanaan reforma agraria yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden (2017), reforma agraria merupakan upaya menata ulang akses dan status hukum atas tanah dan sumber daya alam untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaat tanah, wilayah, serta sumber daya alam. Reforma agraria berarti memperkuat pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tak punya tanah, baik yang tinggal di pedesaan, pinggir-pinggir hutan, pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun di lereng-lereng pegunungan.

Menurut Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (dalam Kastaf Presiden, 2017), terdapat 5 (lima) Program Prioritas Reforma Agraria, yakni: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak

atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); dan (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah sedang berusaha menyelesaikan konflik agraria yang terjadi. Namun, di sisi lain Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa konflik lahan pada masa kepemimpinan Joko widodo periode pertama meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010-2014 sebanyak 1.308 kasus konflik agraria. Sepanjang 5 tahun (2014-2019) terjadi konflik agraria sebanyak 2.243 kasus; mencakup 5,8 juta hektar wilayah konflik di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik ini terjadi antara masyarakat--utamanya petani, masyarakat adat, nelayan, atau warga miskin--dengan kelompok badan usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, properti/real estate, tentara dan Negara. Termasuk diantaranya penggusuran dan pemindahan paksa demi pembangunan infrastruktur, pariwisata dan proyek konservasi. Konflik agraria tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban: 1.236 orang dikriminalisasi, 656 orang dianiaya/terluka, 68 tertembak, bahkan 60 nyawa melayang di wilayah konflik agraria. Dalam konflik agraria ini, perempuan dan anak-anak turut menjadi korban, akibat kekerasan dalam penanganan konflik di lapangan (KPA, 2019).

Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA) mengemukakan perusahaan menjadi pihak yang paling sering

menjadi pelaku dalam konflik agraria dan sumber daya alam. Perusahaan terlibat dalam 221 konflik, disusul dengan Kementerian yang membidangi kehutanan dan atau taman nasional dengan 31 konflik. Dari konflik tersebut, terdapat 47 kasus penangkapan dengan jumlah korban 777 orang, sebanyak 39 kasus pemidanaan dengan jumlah korban 374 orang, sebanyak 25 kasus penganiayaan dengan jumlah korban 309 orang, dan 12 kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan jumlah 29 jiwa.

Dapat dilihat dari data diatas bahwa konflik agraria yang terjadi menimbulkan banyak sekali korban, dan kebanyakan korban berasal dari masyarakat yang memang memperjuangkan hak-hak nya. Perjuangan masyarakat dalam menuntut hak nya merupakan salah satu bentuk usaha reforma agraria yang dilakukan dari bawah atau "*by leverage*". Seiring berkembangnya zaman masyarakat mulai berani menyuarakan hak-hak atas tanahnya, usaha mereka biasa dilakukan dengan spontan atau tidak terorganisir dan kemudian bersifat terorganisir yang diaplikasikan dalam pembentukan kelompok-kelompok yang memang bernasib sama dan memiliki tujuan yang sama. Menurut Saidang dan Suparman (2019), pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Karna perasaan itulah timbul solidaritas antar masyarakat sehingga kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat menjadi wadah perjuangan baru bagi usaha reforma agraria.

Salah satu konflik agraria yang telah berlarut-larut dan belum kunjung selesai adalah konflik agraria di Tulang Bawang, tepatnya di kecamatan Banjar Margo, yang melibatkan petani Desa Bujuk Agung dan sekitarnya dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL). Konflik ini terjadi pada tahun 1990-an ketika PT BNIL melakukan penggusuran paksa atas warga di desa-desa transmigrasi. Penggusuran paksa itu dilakukan untuk mengalih fungsikan lahan desa untuk membangun perkebunan kelapa hibrida. Sudah bertahun-tahun masyarakat desa Bujuk Agung dan sekitarnya melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, yaitu dengan mengadukan permasalahan ini ke pemerintah namun belum membuahkan hasil. Konflik agraria memuncak lagi pada tahun 2016 dengan dilakukannya pendudukan lahan perusahaan oleh masyarakat dan telah berujung pada kisruh antara masyarakat dan pamswakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa) serta kriminalisasi aktivis dan petani. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat yang mana berakibat hilangnya nyawa salah satu warga yang bernama Salim Kancil, ia berjuang mendapatkan hak atas tanahnya. Kasus meninggalnya Salim Kancil akibat konflik agraria hanyalah segelintir kasus yang terkuak dan mendapatkan perhatian pemerintah dan media, mungkin masih banyak lagi warga-warga yang bernasib sama seperti Salim Kancil yang berjuang mendapatkan hak-hak yang memang seharusnya jadi miliknya.

Merujuk pada penelitian (Ikram dan Abdulgani, 2018) dijelaskan bahwa masyarakat/petani sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak

atas tanah selama 3 dekade. Pada periode 1990-an perjuangan awal dilakukan dalam bentuk aksi-aksi spontan, individual dan tidak terorganisir. Setelah rezim orde baru runtuh, perjuangan petani mulai menempuh jalur legal dibantu oleh LSM dan LBH Bandar Lampung. Semenjak tahun 2016 perjuangan selama 3 dekade itu mengalami transformasi ke dalam bentuk yang terstruktur dengan lahirnya Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB). Melalui serikat tani inilah warga desa korban gusuran PT. BNIL berjuang bersama untuk menuntut kembali hak atas tanah nya. Perjuangan petani korban gusuran PT. BNIL ini sudah mencerminkan adanya usaha reforma agraria yang dilakukan dari "bawah" atau "*By Leverage*" melalui upaya komunitas itu sendiri.

Menurut Hotman M Siahaan, 2000), memberikan penjelasan bahwa gerakan dan radikalisasi petani terhadap kekuasaan negara selalu berlangsung dalam konteks antara penguasaan tanah, negara dan rakyat. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa gerakan sosial petani ialah gerakan sosial petani petani yang merasa haknya dirampas, perlakuan ketidakadilan, serta terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum pejabat pemerintah. Adanya perampasan hak milik terhadap mereka seringkali menimbulkan adanya tuntutan yang mengarah kepada aksi demonstrasi. Dalam konteks kasus konflik yang terjadi d Desa Bujuk Agung, peneliti melihat bagaimana usaha reforma agraria yang sudah dilakukan organisasi petani Desa Bujuk Agung yang sudah terstruktur dalam suatu wadah komunitas dan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menjalankan fungsi organisasi.

Penelitian ini akan dilakukan pada konteks usaha reforma agraria yang dilakukan oleh organisasi petani pada kasus konflik agraria petani dan PT BNIL di Tulang Bawang,. Penulis merasa penting untuk melihat bagaimana organisasi petani berusaha dan berpengaruh pada upaya masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah. Penelitian ini akan menggali informasi terkait dengan usaha reforma agraria yang dilakukan organisasi petani dan melihat bagaimana kekuatan, jaringan sosial, hambatan-hambatan dan aktor-aktor yang berperan dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi, khususnya di desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana jaringan sosial, kekuatan internal, hambatan-hambatan dan aktor-aktor yang berperan penting dalam membantu Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dalam usaha reforma agraria dan bagaimana jaringan sosial, kekuatan internal hambatan-hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dalam usaha reforma agraria dan bagaimana jaringan sosial, kekuatan internal dan hambatan-hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan sebagai referensi bagi akademisi ataupun masyarakat umum yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait dengan Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dalam usaha reforma agraria dan bagaimana jaringan sosial, kekuatan internal, hambatan-hambatan, dan aktor-aktor yang

terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

II. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Gerakan Sosial Petani

2.1.1 Pengertian Gerakan Sosial petani

Gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Sydney Tarrow berpendapat gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama rasa solidaritas sosial. dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elit penentang dan pemegang wewenang dalam pembahasan tentang gerakan sosial banyak sekali para pakar teoritis sosial memberikan definisi mengenai gerakan sosial (*sosial movement*).

Karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya salah satunya definisi gerakan sosial dari Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai suatu tujuan bersama melalui gerakan kolektif (*collective action*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.¹ Jadi dapat kita tafsirkan mengenai definisi konsep gerakan sosial dari Giddens yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk

mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Sedangkan menurut Neil Smelser melengkapi pendapat beberapa akademisi teori perilaku kolektif diatas menurut Tily *social movement* merupakan kendaraan utama bagi masyarakat awam untuk berpartisipasi pada kegiatan *politik public* dan menurut Mirsel mendefinisikan gerakan sosial sebagai perangkat keyakinan serta tindakan tak lembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat.

Adapun dua sisi yang menonjol dari difinisi gerakan sosial tersebut yaitu :

Pertama upaya-upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan didalam kelembagaan melalui gerakan sosial yang melibatkan tantangan kolektif tantangan tersebut sering kali berfokus pada kebijakan-kebijakan public atau diarahkan sebagai patokan mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga sosial dan politik distribusi jaminan sosial serta konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial dan politik. Kedua gerakan sosial memiliki tujuan bersifat politis dalam kaitannya mencakup perubahan didalam distribusi kekuasaan dan wewenang. Tujuan-tujuan politik ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi-interaksi yang terus-menerus berkelanjutan dengan aktor-aktor politik di luar gerakan yang terpenting diantaranya adalah sekutu-sekutu dan persaingan-persaingan politik dan pemegang otoritas kekuasaan.

2.1.2 Tipologi Gerakan Sosial

Gerakan sosial memiliki ragam dan tipe gerakan yang variatif gerakan sosial bisa mengakomodir dan memobilisasi partisipan dengan jumlah yang sangat tidak terbatas ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang. Gerakan sosial bisa bergerak dalam lingkup dan batas-batas legalitas yang jelas pada suatu

masyarakat juga bisa pula bergerak secara ilegal sebagai gerakan bawah tanah. Klandemans membagi gerakan sosial menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, *Proactive Social Movement*, (Pergerakan Sosial Proaktif) dan yang kedua yaitu *Reactive Sosial Movement* (Pergerakan Sosial Reaktif).

Pergerakan sosial proaktif merupakan suatu jenis gerakan sosial yang muncul karena adanya suatu kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditolerir dan tujuan mereka adalah untuk mempromosikan perubahan sosial sedangkan pergerakan reaktif ialah gerakan yang muncul karena kondisi tertentu dalam masyarakat mengalami perubahan dan masyarakat memberikan reaksi untuk menolak perubahan tersebut tipe gerakan lainnya dikemukakan oleh David Aberle yang mengklasifikasikan gerakan sosial menjadi empat tipe berdasarkan besarnya perubahan sosial yang dikehendaki dan tipe perubahan sosial yang dikehendaki.

Tipe pertama yaitu *alternative movements* suatu gerakan sosial dari *women christian temprerance union* pada kurung waktu 1990-an yang bertujuan mengubah perilaku orang untuk berhenti minum minuman beralkohol. Para anggotanya yakin jika mereka dapat menutup tempat minuman keras masalah seperti kemiskinan dan kekerasan terhadap istri akan hilang. Tipe kedua adalah *redemptive movements* gerakan sosial yang mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh seperti dalam bidang keagamaan. *reformative movements* gerakan sosial yang mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas *transformative movement* adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh. Tipe ketiga yakni *reformatitive movements* yang mengupayakan reformasi masyarakat

secara menyeluruh tipe ketiga yakni *reformative movements* gerakan yang mengupayakan reformasi masyarakat pada segi tertentu dengan ruang lingkup terbatas sebagai contoh gerakan persamaan hak kaum perempuan.

2.2 Reforma Agraria

2.2.1 Pengertian Reforma Agraria

Menurut Michael Lipton, reforma agraria atau disebut juga dengan land reform (dalam beberapa hal istilah ini sering identik) adalah suatu kegiatan “legislasi yang diniatkan dan benar-benar diperuntukkan meredistribusi kepemilikan, (mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian, dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif mereka, berbanding dengan situasi tanpa legislasi tersebut”. Reforma agraria tidak semata-mata memberdayakan satu pihak dengan didistribusikannya tanah pada mereka namun dapat juga berarti menidakberdayakan pihak lain sebab diambilnya tanah dari tangan mereka. Sebagaimana dinyatakan, “kebijakan reforma agraria bukan sekedar memberdayakan petani miskin, melainkan juga pada pihak lain, menidakberdayakan para penguasa tanah yang aksesnya dikurangi secara berarti.” Karenanya suatu program reforma agraria bukan sekedar memerlukan *political will* yang diwujudkan oleh badan-badan pemerintah. Agar mampu mencapai tujuannya, program reforma agraria sangat memerlukan kekuatan pemerintah yang sanggup memaksa (*government compulsion*).

Dalam konteks Indonesia, reforma agraria bertujuan sebagai “suatu operasi untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang melalui penggunaan kewenangan pemerintahan dalam membuat legislasi, dan kekuasaan membuat legislasi itu berjalan melalui suatu program pemerintah, secara terencana untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan”. Dengan demikian reforma agraria adalah mandat konstitusi yang memiliki cita-cita keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia berupa hak sosial dan ekonominya.

2.3 Konflik Sosial

2.3.1 Pengertian Konflik Sosial

Menurut Muspawi (2014), konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang

mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional

Adapun menurut Dean dan Jeffrey (dalam Rusdiana, 2015), konflik merupakan bentuk pertentangan, ketidaksepakatan, ketidakcocokan antara dua orang atau lebih, antar kelompok orang yang ditandai oleh kekerasan fisik. Konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan.

Menurut Robbins (dalam Ekawarna, 2018), terdapat tiga pandangan orang dalam melihat konflik.

1. Pandangan Tradisional

Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan istilah *violence*, *destruction*, dan *irrationality*. Pandangan ini konsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an dan 1940-an.

2. Pandangan Hubungan Manusia

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik adalah suatu fenomena biasa dan wajar muncul dalam interaksi kelompok dan organisasi. Konflik dianggap sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari sehingga eksistensi konflik harus diterima dan dipersepsi positif, karena akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Pandangan ini memengaruhi teori konflik mulai akhir tahun 1940-an hingga pertengahan 1970-an. Pandangan hubungan manusia atau sering disebut sebagai pandangan kontemporer

menganggap konflik sebagai kejadian alami yang terjadi pada semua kelompok.

3. Pandangan Interaksionis

Pandangan ini justru mendorong munculnya konflik karena diasumsikan situasi kelompok yang kooperatif, damai, tenang, dan serasi menyebabkan kinerja yang cenderung statis, tidak aspiratif, apatis, dan tidak kreatif. Dengan demikian, menurut aliran pemikiran ini konflik perlu dimunculkan, namun harus dipertahankan pada tingkat minimum agar kelompok tetap bersemangat, kritis diri, dan kreatif. Menurut pandangan ini, konflik tidak hanya merupakan kekuatan positif, tetapi juga penting bagi seseorang untuk tampil secara efektif.

Menurut Rahim (dalam Ekawarna, 2018), sebagian besar konflik memiliki konotasi negatif, menimbulkan perasaan negatif, dan sering menyebabkan kehancuran. Sedangkan menurut Menurut Robbins (2003) dalam Ekawarna (2018), konflik dipandang sebagai hasil alami dan tak terelakkan dari orang-orang yang bekerja bersama dalam kelompok dan tim. Jadi, tidak perlu dipandang negatif, melainkan lebih baik dipandang positif sebagai kekuatan potensial dalam berkontribusi terhadap kinerja individu.

Menurut Ekawarna (2018), konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa alasan, beberapa di antaranya termasuk tujuan yang tidak sesuai, nilai dan kepercayaan yang berbeda, ambiguitas dan konflik peran, masalah komunikasi, peraturan yang ambigu, konflik wewenang, evaluasi yang tidak konsisten dan sistem penghargaan, tekanan kerja, konflik tugas, kekurangan sistem informasi, dan lain-lain.

Dari berbagai definisi diatas diketahui bahwa konflik merupakan proses sosial yang terjadi antara individu atau kelompok yang terjadi karena adanya interaksi atau hubungan sosial antar masyarakat yang terjadi secara alami dan tidak dapat terelakkan. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, konflik juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan juga positif, tergantung penyebab dan dampak yang ditimbulkannya.

2.3.2 Jenis-jenis Konflik Sosial

Rusdiana (2015), mengklasifikasikan jenis-jenis konflik sosial ke dalam enam kelompok, yaitu sebagai berikut:

A. Konflik Pribadi

Konflik Pribadi merupakan pertentangan yang terjadi secara individual yang melibatkan dua orang yang bertikai. Misalnya, pertentangan yang terjadi antar dua teman, perselisihan suami dengan istri, pertentangan antara pimpinan dan salah seorang stafnya.

B. Konflik Kelompok

Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam masyarakat. Misalnya, pertentangan antara dua perusahaan barang sejenis dalam memperebutkan daerah pemasaran, pertentangan antara dua kesebelasan olahraga.

C. Konflik Antarkelas Sosial

Konflik antarkelas sosial dapat terjadi pada status sosial yang berbeda, yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan bentuk konflik ini, seperti pertentangan antara majikan dan buruh, pertentangan antara yang kaya dan miskin, dan antara petani dan tuan tanah.

D. Konflik Rasial

Ras, yaitu sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri badaniah yang sama dan berbeda dengan kelompok lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat terlihat dalam bentuk tubuh, warna kulit, corak rambut, bentuk muka, dan lain-lain yang sifatnya kasat mata sehingga dengan mudah dapat dibedakan dengan kelompok lain. Jadi, konflik rasial ini adalah pertikaian yang terjadi karena didasarkan perbedaan pandangan terhadap perbedaan ciri-ciri jasmaniah tersebut. Misalnya, ras kaukasoid dipandang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ras negroid sehingga sering terjadi pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan ras tersebut, seperti *apartheid* dan diskriminasi yang terjadi di Amerika.

E. Konflik Politik

Politik merupakan salah satu aspek dalam sistem sosial yang menyangkut masalah kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan. Konflik politik adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan pendapat atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok. Misalnya pertikaian antara pendukung dua calon presiden dan pertikaian antara dua kubu partai.

F. Konflik Agraria

Menurut Ali Achmad Chomzah konsep agrarian dapat didefinisikan menjadi pengertian:

1. Dalam keputusan lama: Perkataan agrarian berasal dari bahasa Yunani/Grik Purba “ager”, yang berarti lading atau tanah. Dari bahasa latin “agrarius” yaitu apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah. Dari bahasa Belanda “akker” yang berarti ladang, tanah, pertanian. Dari bahasa Inggris “land” yang berarti tanah atau ladang.

2. Dalam Undang-undang Pokok Agraria: Pengertian agrarian dalam arti sempit dalam pasal 4 ayat 1 UUPA antara lain ditentukan, bahwa adanya ,macam-macam hak atas permukaan bumi disebut tanah tersebut. Jadi pengertian agrarian dalam arti sempit adalah permukaan bumi yang disebut sebagai tanah (Achmad, 2002: 34).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Bogdan & Biklen, S., 1992 (dalam Saeful, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan

Melalui metode pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti dalam memetakan jaringan sosial, actor yang berperan, kekuatan internal, hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian konflik agraria di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dalam memahami setiap data dan sumber informasi

sehingga dengan menggunakan pendekatan kualitatif data dapat dijabarkan dengan jelas melalui kata-kata.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe naratif. Data yang dikumpulkan berupa narasi, cerita atau deskripsi tentang srangkaian keadaan, peristiwa dan fenomena terkaita dengan pengalaman informan atau narasumber. Pendekatan naratif merupakan istilah umum yang menangkap informasi dari dimensi pribadi, dan pengalaman manusia dari waktu ke waktu, dan mempertimbangkan hubungan antara pengalaman individu dan budaya (John MC, 2001).

Dengan menggunakan tipe ini peneliti dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Melihat dan mendengarkan informasi terkait dengan penelitian ini. Kemudian mencatat secara terperinci dan menjelaskan dengan kata-kata atau penjabaran lengkap. Penelitian tipe naratif mampu menggambarkan komunitas-komunitas yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti mendengarkan secara langsung pemaparan atau cerita dari informan penelitian, kemudian mencatat dengan objektif mengenai data yang diperoleh di lapangan dan merekam suara dari penuturan informasi dengan alat bantu handphone.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penelitian ini berfokus pada

komunitas petani STKGB yang tujuan dibentuknya berfokus pada penyelesaian konflik agraria antara masyarakat desa dengan perusahaan. Peneliti merasa penting untuk melihat usaha-usaha yang dilakukan komunitas STKGB dalam upaya penyelesaian konflik yang sudah terjadi sejak lama namun tidak kunjung usai.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat agar peneliti dapat melakukan pembatasan mengenai objek yang akan diteliti. Manfaat lainnya yaitu, agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan, hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan (Moleong, 2007).

Pada penelitian ini, penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada komunitas Serikat Tani Korban Gusuran PT.BNIL (STKGB) untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan, jaringan sosial, kekuatan (*power*), hambatan-hambatan dan aktor-aktor yang berperan penting dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

3.4 Informan Penelitian

Peneliti mempunyai beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh informan penelitian. Beberapa kriteria dari informan penelitian yang dimuat oleh peneliti, diantaranya :

1. Informan merupakan anggota STKGB dan atau terlibat dalam pergerakan STKGB
2. Sudah mengikuti kejadian konflik sejak awal terjadi konflik atau sebagai pelaku sejarah.
3. Sudah pernah mengikuti perkembangan konflik dengan perusahaan.
4. Mengetahui situasi konflik yang terjadi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Teknik observasi

Menurut Sugiyono (2013), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah proses yang penting karena melibatkan proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan dimana peneliti bertindak sebagai pengamat dan tidak ikut dalam kehidupan orang yang di observasi.

2. Wawancara

Selain observasi, langkah selanjutnya adalah wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian yaitu informan yang dapat memberikan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mencari informasi (Narbuko & Ahmadi, 1997).

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam bentuk terstruktur yang artinya wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan pewawancara sebelumnya (Sugiyono, 2013).

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Arikunto (2006) ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi berguna sebagai pendukung kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang diperoleh di lapangan pada saat melakukan penelitian. Dan dapat juga digunakan untuk memeriksa keabsahan data.

3.6 Teknik Analisi Data

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun Milles dan Hubberman (dalam Wandu dkk, 2013).

2. Penyajian Data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Miles dan Hubberman (dalam Wandu dkk, 2013).

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori Sugiyono (dalam Wandu dkk, 2013).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Kampung Bujuk Agung

4.1.1 Sejarah Kampung

Semula Kampung Bujuk Agung merupakan bagian dari wilayah Kampung Induk Banjar Agung. Sejak adanya program pemekaran Kampung tahun 1991 oleh Kabupaten Lampung Utara, maka Kampung Bujuk Agung resmi menjadi Kampung definitif dan sebagai Kampung Induknya dan Kampung Bujuk Agung sebagai Kampung Pemekarannya dan selaku PJ Kepala Kampung dijabat oleh *Raja Alam*.

Kampung Bujuk Agung terdiri dari lima Rukun Warga (RW) memiliki adat istiadat yang berbeda karena penduduknya merupakan Pembauran dari *Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Lampung, Suku Batak, Suku Mesuji Lampung*.

Kampung Bujuk Agung ini sebagian besar mata pencaharian Pokoknya bersumber dari lahan Perkebunan Karet yang luasnyapun terbatas hanya $\frac{3}{4}$ ha. Untuk masing masing KK hasil dari pembagian Translok 1991.

Pada Tahun 1998 Kepala Kampung Bujuk Agung di jabat oleh *Agusman Ishak* selaku Pj. Kepala Kampung s.d tahun 1999 , dan pada masa itu beliau bertugas dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan Kepala Kampung

definitif. Pemilihan Kepala Kampung secara demokrasi oleh Masyarakat Kampung Bujuk Agung untuk yang pertama kali terlaksana pada tahun 1999 bertempat di Balai Kampung Bujuk Agung di ikuti oleh dua orang calon, dan dimenangkan oleh *Bpk Agusman Ishak*, sehingga *Bpk. Agusman Ishak* ditetapkan sebagai Kepala Kampung Bujuk Agung masa bhakti 1999 s.d 2007.

Masa kepemimpinan Bpk. Agusman Ishak juga dikenal seorang pimpinan yang bijaksana berkeinginan juga untuk melanjutkan kepemimpinan pendahulunya membangun kerukunan warga dan membudayakan gotong royong sebagai mana pendahulunya. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan pemerataan Pembangunan dalam Wilayah Kampung Bujuk Agung, saat itu maka oleh Pj. Kepala Kampung Bpk. Samidi sebagai penerus Bapak Agusman Ishak yang berakhir masa jabatannya mempunyai program kerja memekarkan *Wilayah Kampung Bujuk Agung menjadi 2 Kampung yaitu Kampung Bujuk Agung sebagai Kampung Induknya dan Kampung Agung Jaya sebagai Kampung hasil Pemekaran*. Dalam kurun waktu 1 tahun kepemimpinan Bapak Samidi berhasil memekarkan Kampung yaitu Kampung Agung Jaya sehingga geliat pembangunan di Kampung Bujuk Agung semakin terlihat dan terbukti pada tahun 2008 terbit sertifikasi tanah Masyarakat Kampung Bujuk Agung sebanyak 1.200 Buku sertipikat tanah sehingga hak kepemilikan tanah Warga Masyarakat semakin kuat .

Pada tahun 2008 terjadi pemilihan Kepala Kampung Bujuk Agung setelah dimekarkan dan diikuti oleh 4 orang peserta calon Kepala Kampung.

Dalam pemilihan kepala Kampung Bujuk Agung tersebut terpilih *Bpk. I Gusti Komang Agus Putra* sebagai Kepala Kampung terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Kampung definitif pada tanggal 05 Mei 2008 oleh Bupati Tulang Bawang Drs. Abdurachman Sarbini,SH.MH. untuk masa jabatan 2008 s.d 2014. Bukti dan karya nyata kepemimpinan Bpk. I.Gusti Nyoman Agus Putra dengan menjalin dan membina para perangkat dan aparatur Pemerintah Kampung dalam melaksanakan Program kerja Kampung sebagai ujung tombak Pemerintah di level paling bawah. Budaya gotong royong sebagai warisan budaya yang adi luhung terus dipupuk untuk membangun berbagai macam sarana dan prasarana Kampung Bujuk Agung.

Program unggulan Kabupaten Tulang Bawang melalui Program Gerakan Serentak membangun Kampung (GSMK) Tahap I. Jalan Underlugh yang melalui ruas jalan kampung Dusun I s.d Dusun 3 sepanjang 1.250 m selesai dibangun berkat semangat gotong royong masyarakat sebagai bentuk swadaya dan didukung dana stimulan dari Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp. 200.000.000,-

Masa jabatan Kepala Kampung Bujuk Agung diteruskan oleh Bapak Purwo Sasmito Pada tanggal 19 Juni 2014 resmi ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang sebagai Pj. Kepala Kampung menggantikan Bapak I. Gusti Komang Agus Putra yang telah berakhir masa jabatannya.

Geliat pembangunan di Kampung Bujuk Agung terus berlanjut melalui GSMK Tahap 2 ,ruas jalan kampung yang melalui Dusun I,Dusun III selesai dibangun dengan total pengerjaan sepanjang 1.250 m dengan dana

stimulan Pemkab Tulang Bawang senilai Rp. 200.000.000,- didukung oleh gerakan Swadaya Masyarakat berupa gotong Royong.

Program RIS PNPM berupa Jalan *Onderlagh* di Dusun 5 sepanjang 1.150 m juga selesai berkat dukungan dan partisipasi Masyarakat Kampung Bujuk Agung. Sumur bor berhasil di bangun di wilayah RK 3 untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi Masyarakat di waktu musim kemarau.

Dengan Program Forum Keserasian Sosial kemensos Pusat telah direalisasikan pembangunan Drainase dan Talud sepanjang 370 m dan pembangunan tanggul/bronjong . Menjadi tugas dan Pekerjaan berat pada masa Kepemimpinan Bapak Purwo Sasmito karena harus mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Pendataan dan inventarisasi Aset dan Potensi Kampung demi mendukung program Pemerintah terus digali dan dipersiapkan menjadi data kampung yang valid, terukur dan terencana guna menumbuhkembangkan potensi Kampung Bujuk Agung yang mandiri dan memberi kontribusi yang nyata dalam pembangunan segala bidang. Adapun urutan berikut :

Tabel I
Urutan Nama Kepala Kampung

<i>Nomor</i>	<i>Nama Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung</i>	<i>Masa Jabatan/Pireode (lamanya menjabat)</i>	<i>Ket. /Proses Pengangkatan dan Kejadian2 penting</i>
1	Agusman Ishak	1998 s.d 2000 2000 s.d 2007	Pj. Kepala Kampung Kepala Kampung hasil Pemilihan Kepala Kampung Oleh Masyarakat
2	samidi	juli 2007 s.d Januari 2008	Pj. Kepala Kampung.
3	I.G Komang Agus, P	Mei 2008 s.d Mei 2014	Kepala Kampung hasil Pemilihan kepala Kampung oleh masarakat
4	Purwo sasmito	juni 2014 s.d januari 2015	Pj. Kepala Kampung
5	Er'aini SE	Februari 2015 – Des 2015b	Pj. Kepala Kampung
6	Nurokhim	Des 2016 – 22	Kepala Kampung hasil Pemilihan kepala Kampung oleh masarakat

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

4.1.2 Demografi Kampung

a. Letak dan Luas Wilayah



Gambar 1. Peta Desa Bujuk Agung

Kampung Bujuk Agung merupakan salah satu dari 12 kampung di wilayah kecamatan Banjar Margo yang terletak \pm 4 kearah barat daya kecamatan, sebelah timur berbatasan dengan kampung Agung Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan kampung Purwa Jaya, sebelah utara berbatasan dengan kampung PT BNIL Dan Sumber Makmur, sebelah barat berbatasan dengan kampung Indraloka II kecamatan Way Kenanga kabupaten tulang bawang barat.

Kampung Bujuk Agung mempunyai luas wilayah 750 ha. Kampung Bujuk Agung terdiri dari daratan rendah ketinggian rata-rata 250-300 m dari permukaan laut.

b. Iklim

Iklim kampung Bujuk Agung mempunyai iklim yang sama seperti Kampung lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.

c. Keadaan Sosial Kampung

1) Jumlah Penduduk

Kampung Bujuk Agung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.224 jiwa. Jumlah laki-laki 1.719 jiwa, jumlah perempuan 1.505 jiwa, jumlah kepala keluarga 1076, jumlah keluarga miskin 86 KK. Keadaan social dalam dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II

Jumlah Penduduk Bujuk Agung

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk Jiwa
1	Dusun I	676
2	Dusun II	663
3	Dusun III	690
4	Dusun IV	569
5	Dusun V	626
Jumlah Total		3.224 jiwa

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

2) Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat Kampung Bujuk Agung adalah sebagai berikut :

Tabel III
Tingkat Pendidikan Kampung Bujuk Agung

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta huruf	74
2	Jumlah penduduk tidak tamat SD	689
3	Jumlah penduduk tamat SD	919.
4	Jumlah penduduk tamat SMP	1.064
5	Jumlah penduduk tawat SMA	791
6	D-3	547
7	S-1	59
Jumlah		3.224

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

d. Keadaan Ekonomi Kampung

1) Mata Pencarian

Karena Kampung Bujuk Agung merupakan Kampung pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel IV

Mata Pencarian Penduduk Kampung Bujuk Agung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	A. Buruh Tani/perkebunan	269
2	B. Petani	1.610
3	C. Peternak	3
4	D. Pedagang	43
5	E. Tukang Kayu	14
6	F. Tukang Batu	8
7	G. Penjahit	5
8	H. PNS	10
9	I. Wiraswasta	260
10	J. TNI/Polri	3
11	K. Perangkat KAMPUNG	36
12	L. Pengrajin	1
13	M. Industri kecil	3
14	N. Buruh Industri	16
15	O. Sopir	35
16	P. Lain-lain	908

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

2) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di kampung Bujuk Agung sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian/perkebunan.

Tabel V

Pola Penggunaan Tanah Kampung Bujuk Agung

No	Jenis Lahan/Tanah	Jumlah
1	Tanah perkebunan rakyat	508 ha
2	Tanah pemukiman penduduk	236 ha
3	Tanah lahan perkantoran	1 ha
4	Lahan lapangan	2 ha
5	Lainnya	21 ha
Jumlah		750 ha

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

3) Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Kampung Bujuk Agung adalah sebagai berikut :

Tabel VI

Data Kepemilikan Ternak Kampung Bujuk Agung

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam	2.905 ekor
2	Kambing	827 ekor
3	Itik	100 ekor
4	Kerbau	30 ekor
5	Sapi	675 ekor

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

4) Sarana dan Prasarana Kampung

Kondisi sarana dan prasarana Kampung Bujuk Agung secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel VII

**Sarana dan Prasarana Kampung yang Dimiliki Kampung
Bujuk Agung**

No	Sarana dan Prasarana Kampung	Jumlah
1.	Jumlah Jalan Kampung	30 km
2.	Balai Kampung	1 unit
3.	TPA	3 unit
4.	Sekolah SD/MI	2 unit
5.	Sekolah SMP/MTS	1 Unit
6	Sekolah SLTA/MA	2 Unit
6.	Sekolah TK	2 unit
7.	Puskesmas pembantu	1 unit
8.	Masjid	4 unit
9.	Mushola	12 unit
10	Pura	2 Unit
10.	Gereja	1 unit
11.	Sanggar	1 unit
12.	Air bersih Sumur Bor	8 unit
13.	Lapangan	2 unit
14.	Posyandu	3 unit
15.	Polindes	1 unit

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

4.1.3 Kondisi Pemerintahan Kampung

a. Pembagian Wilayah Kampung

Wilayah pemerintahan Kampung Bujuk Agung di bagi menjadi 4 dusun atau 5 Rukun Warga (RW) dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 22 dan jarak antar dusun berkisar 1 km sampai 5 km. Pembagian wilayah Kampung Bujuk Agung adalah sebagian berikut :

Tabel VIII

Pembagian Pemerintahan Kampung Bujuk Agung

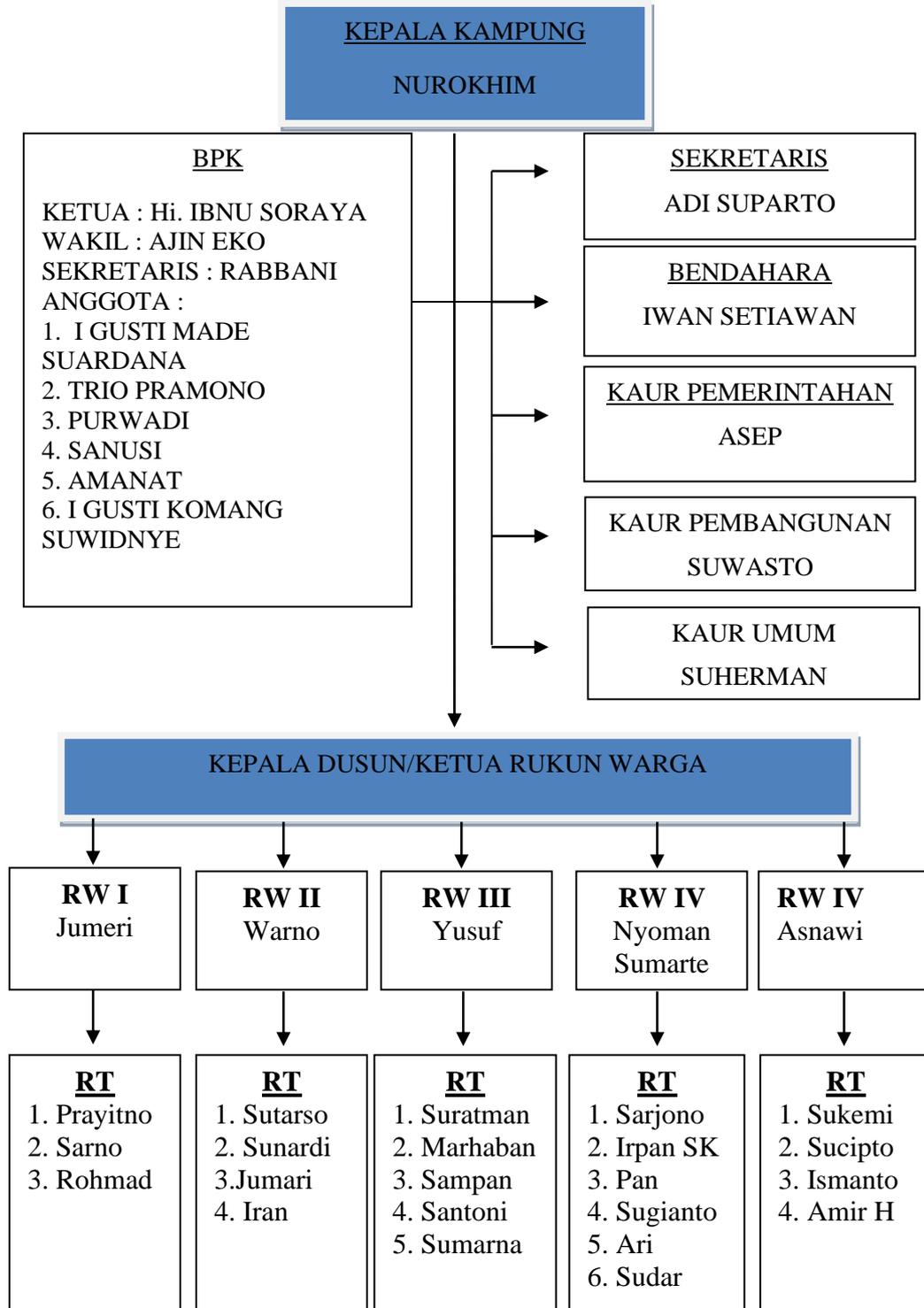
No	Nama RW/Dusun	Jumlah RT
1	Dusun I	4
2	Dusun II	4
3	Dusun III	5
4	Dusun IV	5
5	Dusun V	4
Jumlah Total		22

Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Kampung Bujuk Agung menganut sistem kelembagaan pemerintahan Kampung dengan pola minimal berdasarkan perda No 14 Tahun 2005, selengkapnya sebagai berikut :

BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG BUJUK AGUNG
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG



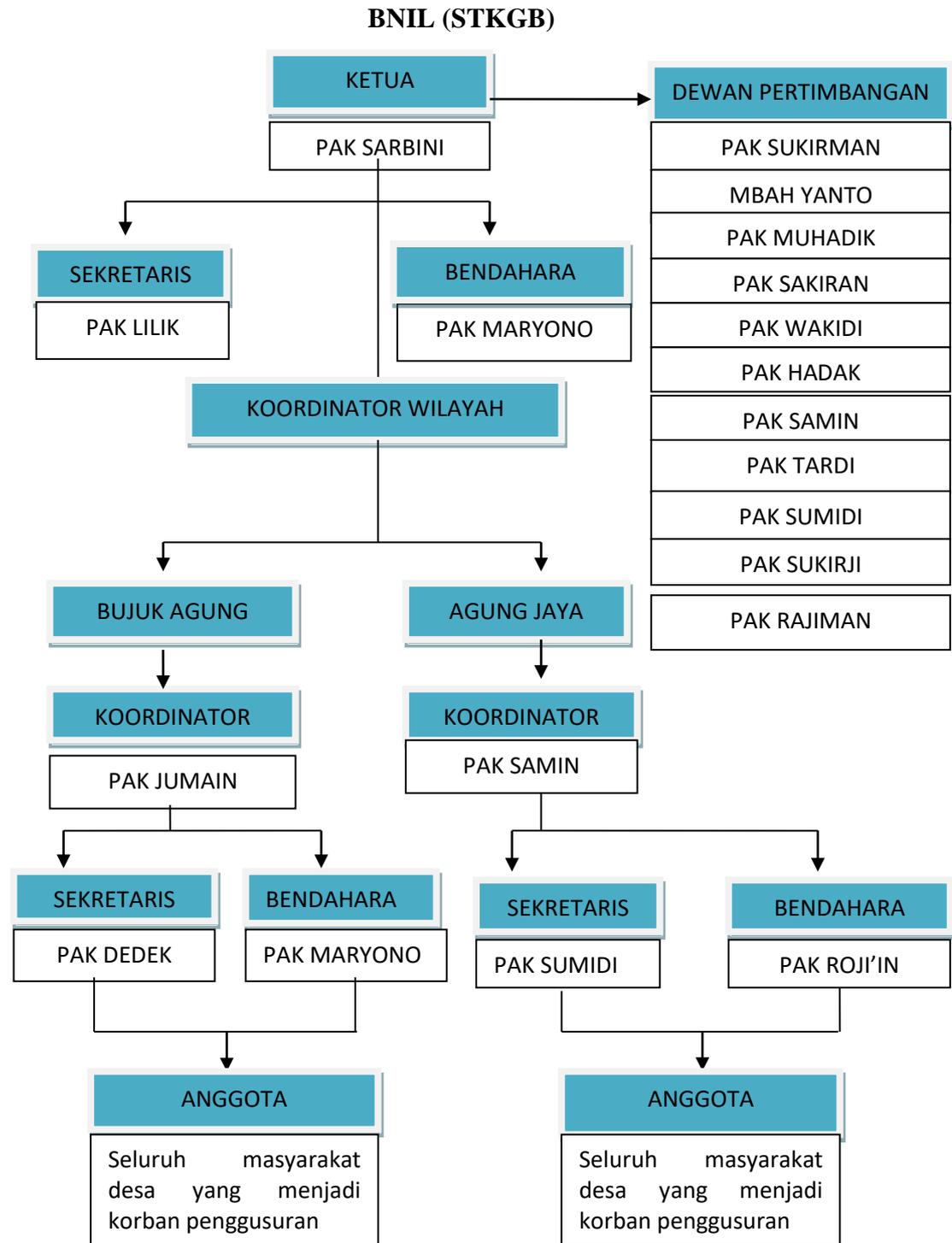
Sumber : Profil Desa Bujuk Agung, 2017.

4.2 Gambaran Umum Komunitas Serikat Tani Korban Gusuran PT.BNIL (STKGB)

STKGB (Serikat Tani Korban Gusuran PT BNIL) merupakan gerakan sosial petani yang dibentuk dan telah melakukan aksi atas perampasan tanah dan hak plasma oleh PT BNIL. Anggota STKGB adalah korban gusuran PT. BNIL yang belum pernah mendapatkan penyelesaian dan/atau ahli warisnya. Pada umumnya anggota STKGB berdomisili di desa Bujuk Agung atau Agung Jaya. Tetapi ada juga yang tinggal di Gedong Aji atau Inderaloka II atau Way Abung. Sebab korban gusuran PT. BNIL yang belum mendapatkan penyelesaian tersebar di berbagai tempat. Bahkan ada yang saat ini tinggal di luar Lampung. Jumlah anggota STKGB pada September 2016 mencapai 2.350 orang. Pasca penangkapan tokoh-tokohnya, banyak anggota yang mengundurkan diri. Alasan mengundurkan diri adalah: takut. Pengunduran diri biasanya disampaikan secara lisan, baik langsung maupun lewat orang ke tiga. Sehingga jumlah keanggotaan saat ini (2018), oleh pengurus diperkirakan menyusut menjadi 1.700-an orang. Saat dilakukan penelitian ini STKGB sedang melakukan pendataan ulang keanggotaan. Basis keanggotaan STKGB saat ini terkonsentrasi di desa Bujuk Agung, Agung Jaya dan Gedong Aji. Di 3 desa ini korban gusuran PT. BNIL yang belum mendapatkan penyelesaian memiliki perwakilannya di Dewan Pimpinan STKGB. Komunitas STKGB sendiri sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian dari mulai melaporkan kepada pemerintah daerah dan juga kampanye publik seperti aksi-aksi damai yang dilakukan bersama masyarakat korban gusuran. Kemudian STKGB juga berupaya

dengan menempuh jalur hukum, dengan menjalin relasi dengan LBH bandarlampung sebagai payung hukum komunitas STKGB dan juga pihak lainnya seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, Komnas HAM, dan instansi terkait lainnya yang memang berfokus pada permasalahan konflik agraria. Upaya ini sudah sampai ke pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden dan sudah mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo dan menurut penjelasan STKGB, proses penyelesaian kasus ini sekarang sudah masuk dalam daftar agenda penyelesaian konflik oleh pemerintah pusat. Struktur kelembagaan komunitas STKGB sebagai berikut :

BAGAN II
STRUKTUR ORGANISASI SERIKAT TANI KORBAN GUSURAN PT.



Sumber : Data Peneliti, 2020

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan penutup berupa kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan dalam isi skripsi ini, agar pembaca bisa mengerti dengan membaca secara singkat dari kesimpulan yang penulis sampaikan, sekaligus bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan juga menitikberatkan kepada pembahasan yang sudah dijelaskan. Berdasarkan pemaparan materi, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016, dibentuklah komunitas petani bernama Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) yang lebih terstruktur dengan struktur organisasi yang jelas dan tujuan utamanya ialah sebagai suatu wadah yang dapat menyatukan masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya kembali. Serikat Tani Korban Gsusan PT.BNIL sudah melakukan usaha reforma agraria dengan melakukan berbagai upaya salah satunya dengan jalur advokasi dimana masyarakat meminta kepastian hukum kepada pemerintah, upaya yang dilakukan sudah sampai ke Kantor Staf Presiden dan STKGB juga meminta dukungan pihak lainnya seperti Kementerian Desa, Komnas HAM, dan Kementerian ATR BPN. Selain melalui

jalur hukum komunitas petani STKGB juga sudah melakukan kampanye publik yaitu dengan melakukan aksi-aksi demo dan melakukan pendudukan lahan dikawasan PT. BNIL yang berujung pada penangkapan petani dan aktivis karena dianggap sebagai provokator.

2. STKGB menjalin kerjasama dan relasi dari berbagai pihak, dari berbagai pihak ini yang terlibat langsung seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, LBH Bandarlampung, Wahana Lingkungan Hidup, Komnas HAM, Kementerian Desa, dan Kementerian ATR BPN. Kemudian yang tidak terlibat langsung seperti GKSBS, AGRA, Lesbumi, dan Suku Anak Dalam. Kekuatan internal STKGB untuk saat ini dikatakan sangat kurang karena lemahnya solidaritas antar anggota dan pemahaman terkait situasi konflik yang terjadi dari anggota dan pemuda sebagai penerus perjuangan sangat kurang. Hambatan perjuangan STKGB dari internal sendiri kurangnya solidaritas antar anggota, generasi awal atau pelaku sejarah yang paham proses terjadinya konflik pun sudah banyak yang meninggal, dan kaum muda banyak yang sudah tidak peduli dan perasaan kehilangannya pun sudah tidak ada sehingga estafet perjuangan pun seperti terhenti dan tidak memiliki penerus lagi. Kemudian dari eksternal kurangnya kepedulian dan keberpihakan pemerintah dalam upaya mendukung masyarakat. Kebijakan-kebijakannya pun menurut masyarakat lebih pro kepada korporasi sehingga ini menjadi satu

hambatan bagi STKGB dalam perjuangannya mendapatkan hak atas lahannya kembali.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran Bagi Komunitas Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB)

Saran bagi STKGB yaitu perlu adanya penguatan internal organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi organisasi, mempererat solidaritas antar anggota, mencegah keluarnya anggota dari organisasi, dan perlu adanya kaderisasi yang baik agar para pemuda siap melanjutkan estafet perjuangan dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

2. Saran Bagi Pemerintah

Saran bagi pemerintah adalah agar pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus berpihak kepada masyarakat dan hadir dalam proses penyelesaian konflik sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat desa Bujuk Agung dengan perusahaan PT. BNIL. Pemerintah harus tegas dan jelas dalam membantu dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi.

3. Bagi Calon Peneliti Berikutnya

Selain kemauan untuk meneliti dengan *concern* kasus konflik sosial seperti ini, diharapkan nantinya peneliti mampu menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan serta mampu mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk

perjuangan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan dari bawah atau “*by leverage*”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kastaf Presiden (2017). *Pelaksanaan Rerofma Agraria (Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017)*. Jakarta. Kantor Staf Presiden, 2017.
- Environmental Services Program. *Buku Panduan Pemetaan Partisipatif (Dengan Peta Kulihat Desaku)*. Jakarta. Environmental Services Program, 2007.
- Tuti Bahfiarti. 2015. Studi Pemetaan Sosial dan Penyusunan Corporate Social Responsibility (CSR) Master Plan Terminal BBM Jayapura (Makassar : Kedai Buku Jenny).
- Soyomukti, Nurani. 2014. *PENGANTAR SOSIOLOGI: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulsyani. 2015. *SOSIOLOGI: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurmansyah, Gungsu., Nunung, R., & Recca, A, H. 2019. *PENGANTAR ANTROPOLOGI Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Moleong, L. J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rusdiana, A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ekawarna. 2018. *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

John MC, L. 2001. *Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy*. London: Sage Publications.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R & D)*. Bandung. Alfabeta.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Saidang dan Suparman. "Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar." *STKIP Muhammadiyah Enrekang*. (2019) : 122

Ikram dan Abdulgani. "Transformasi Resistensi: Tiga Dekade Perjuangan Atas Tanah Petani Korban Gusuran PT. BNIL Di Lampung." *Universitas Lampung*. (2018) : 4-7.

Fahmi dan Zaimuddin. "Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Di Kabupaten Tanggamus." *Universitas Lampung*. (2015).

Fauziah, Mayang., A. Damayanti., & A. Rohman. 2014. *Perlaku Knowledge Sharing Multi Bahawa Pada Komunitas Fakta Bahasa*. *Jurnal Kajian Informasi & Kepustakaan*.

Darmawan, A. 2016. *Peran Komunikasi Kelompok Dalam Konsep Diri*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Basuki, Y., Roos, Akbar., Pradono., & Miming, Miharja. 2013. *Komunitas Online : Pergeseran Terminologi Komunitas Dari Geddesian Menuju Era Informasi Dalam Konteks Perencanaan Transportasi Perkotaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kusumastuti, Ambar. 2014. *Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Di Komunitas Angklung Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasanah, Nur. 2017. *Peranan Komunitas Harapan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia Sekolah Di Kawasan Pasar Johar Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Putri, Meri A. 2018. *Peran Komunitas Jalan-Jalan Edukasi Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Panti Asuhan Di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Benjamin, Frangky., Johny, L., Markus, K. “Eksistensi Kelompok-Kelompok Sosial Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.” Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi. Edisi XXI (2016) : 53-54

Tejokusumo, B. 2014. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Muspawi, Mohamad. 2014. *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*. Jambi: Universitas Jambi.

Angreni Siska dan Taula Sari Rona. 2017. *Ketersediaan Dan Pemanfaatan Media Komponen Instrumen Terpadu (Kit) Ipa Di Sd Negeri Kecamatan Nanggalo Kota Padang*.

Ditha Prasanti. 2018. *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*.

Wandi Sustiyo, Nurharsono Tri. 2013. *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang*.

Siahaan, Hotman M. 2000. “Gerakan Sosial Petani Terhadap Kekuasaan Negara”, dalam J.B. Kristanto (eds.) *1000 Tahun Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Website

Rahmat Pupu Saeful. 2019. Penelitian kualitatif. <yusup.staf.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/dukung-sertifikasi-tora-melalui-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan-92578> [Di akses pada 26-sept- 2019, pukul 13.45 WIB].

http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/133/Bersatu_Melawan_Perampasan_Tanah_Jalankan_Reforma_Agraria_Untuk_Keadilan_dan_Kesejahteraan_Rakyat/ [Di akses pada 26-02-2020]

<https://tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt> [Di akses pada 20-02-2020]

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106132321-20-462771/konflik-lahan-era-jokowi-2-kali-lipat-dari-2-periode-sby> [Di akses pada 10-03-2020]

<http://betahita.id/2019/01/19/huma-ada-326-konflik-sda-dan-agraria-sepanjang-2018/> [Di akses pada 10-03-2020]

<https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/mengapa-konflik-agraria-struktural-terus-menerus-meledak-di-sana-sini> [Di akses pada 10-03-2020]

<https://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/> [Di akses pada 30-03-2020]

<http://ksp.go.id/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-pemerintah-selesaikan-perhutanan-sosial-dan-reforma-agraria/index.html> [Di akses pada 01-04-2020]